

## PERMASALAHAN KEAKURATAN DATA PENERIMA BANTUAN SOSIAL COVID-19

13

Mohammad Teja

### Abstrak

*Hingga saat ini, pandemi Covid-19 masih melanda berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan jumlah kasus terkonfirmasi dan kasus meninggal semakin bertambah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah berupaya sekuat tenaga hadir untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak Covid-19. Program bantuan sosial baik yang sudah berjalan sebelum pandemi maupun pada saat pandemi bertujuan mengurangi dampak sosial dan ekonomi masyarakat akibat pandemi. Persoalan yang selalu muncul ketika bantuan sosial digelontorkan pemerintah adalah data penerima bantuan sosial yang tidak sesuai dan tidak akurat. Tulisan ini membahas bantuan sosial saat pandemi Covid-19, permasalahan keakuratan data beserta alternatif solusi. Masih banyak laporan masyarakat yang menganggap bantuan sosial tidak tepat sasaran sehingga masyarakat menuntut agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembaharuan data secara terus-menerus. DPR RI melalui Komisi VIII diharapkan mendesak kementerian/lembaga terkait untuk berkoordinasi dalam memperbaharui data masyarakat miskin dan hampir miskin sebagai penerima bantuan sosial.*

### Pendahuluan

Sudah sekitar enam bulan pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Jumlah kasus terkonfirmasi yang tidak kunjung turun sejak Covid-19 diumumkan pada tanggal 2 Maret 2020, tentunya sudah memengaruhi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat saat ini. Di Provinsi DKI Jakarta misalnya, penularan Covid-19 pada masa transisi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) lalu, tidak menunjukkan adanya penurunan kasus terkonfirmasi Covid-19

bahkan penularan menjadi semakin massif. Oleh karenanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PSBB fase kedua pada 14 September 2020. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan sekaligus membiasakan masyarakat untuk taat terhadap adaptasi baru kesehatan sehingga dapat menurunkan jumlah kasus terkonfirmasi Covid-19. Pengawasan dari semua elemen masyarakat diperlukan untuk



menegakkan hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan.

Kegiatan sosial masyarakat yang dibatasi oleh PSBB berdampak pada ruang gerak ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup yang berpengaruh besar terhadap ketahanan ekonomi keluarga (Kompas, 11 September 2020). Pada dimensi ketahanan ekonomi ini, kekuatan simpanan uang dan tabungan keluarga dapat membantu masyarakat untuk mampu bertahan dalam situasi pandemi ini. Namun demikian, PSBB dapat mengubah pola hidup masyarakat dalam menjalani aktivitas pemenuhan kebutuhan hidup keluarganya. Masyarakat yang bergerak di sektor informal menjadi golongan yang paling terkena dampak terhadap kebijakan PSBB.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, kebijakan PSBB yang meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja; pembatasan kegiatan keagamaan; dan pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, bertujuan untuk mencegah semakin meluasnya penularan Covid-19. Namun tidak semua masyarakat dapat bekerja dari rumah. Kebanyakan masyarakat harus keluar rumah dan melakukan tatap muka untuk mendapatkan penghasilan. Di mana saat pandemi ini, penghasilan menjadi berkurang. Di sinilah peran pemerintah dibutuhkan untuk mengisi kekurangan tersebut. Melalui Kementerian Keuangan memberikan alokasi APBN untuk penanganan dampak dan penyebaran Covid-19 sebesar Rp405,1 triliun.

Usaha keras dan terus-menerus telah dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengurangi dampak sosial-ekonomi

yang ditimbulkan akibat pandemi Covid-19, salah satunya melalui pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial diharapkan dapat mendongkrak perekonomian yang minus 5,32% di kuartal II 2020 (nasional.kompas.com, 3 September 2020). Pandemi sangat berpotensi menghilangkan pekerjaan yang akibatnya dapat menyebabkan kemiskinan massal. Bantuan sosial yang diberikan tunai maupun nontunai semata hanya sebagai katup penyelamat sosial dan peredam gejolak sosial. Tulisan ini membahas bantuan sosial saat pandemi Covid-19, permasalahan keakuratan data, serta alternatif solusi.

### **Bantuan Sosial pada Pandemi Covid-19**

Bantuan sosial yang disiapkan oleh pemerintah dalam upaya menyelamatkan perekonomian masyarakat melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berbentuk bantuan tunai, sembako, permodalan UMKM, hingga diskon tarif listrik yang disalurkan mulai April hingga Desember 2020 (antaranews.com, 13 September 2020), adapun program yang diberikan kepada masyarakat antara lain seperti: (1) Program Keluarga Harapan, target 10 juta penerima manfaat, disiapkan uang sebesar Rp37,4 triliun dan sudah direalisasikan sebesar Rp29,13 triliun atau 77,9% per 4 September 2020; (2) Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro, ditargetkan 12 juta pengusaha mikro dan telah diberikan sebesar Rp13,4 triliun atau 9% dari Rp22 triliun per 10 September 2020; (3) Bantuan Subsidi Upah Pekerja di Bawah Rp5 juta, baru tersalurkan sebanyak Rp3,6 triliun (9,5%) dari Rp37,87 triliun. Targetnya adalah peserta BPJSTK sebanyak 15,7 juta peserta; (4) Bansos Tunai Luar Jabodetabek dengan

target sebanyak 1,18 juta orang, sudah direalisasikan sebesar 67,3% atau Rp21,82 triliun dari Rp32,4 triliun yang dijanjikan pemerintah; (5) Bansos Tunai Program Kartu Sebako NonPKH, dengan jumlah uang sebanyak Rp4,5 triliun dan sudah disalurkan seluruhnya kepada 9 juta orang Kelompok Penerima Manfaat (KPM); (6) Bansos Sembako Jabodetabek dengan target 4,2 juta orang, sudah terealisasi sebesar 57,2% (Rp3,82 triliun dari Rp6,8 triliun) per 4 September 2020; (7) Penyaluran Pinjaman Koperasi melalui Lembaga Pengelolaan Dana Bergulir KUMKM, telah direalisasi sebesar Rp670 miliar (67%) per 6 September 2020 dari Rp1 triliun dengan target 100 koperasi; (8) Kartu Pekerja dengan target sebanyak 5,6 juta orang, bantuan diberikan pemerintah sebanyak Rp20 triliun, dan baru diberikan Rp10,93 triliun (54,7%); (9) Diskon Listrik (450VA dan 900VA) yang direncanakan untuk 33,64 juta pelanggan, program yang hingga Desember 2020 diestimasi menghabiskan Rp12,18 triliun (79,1%) dari Rp15,4 triliun; (10) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dengan target 12,3 juta kepala keluarga dan telah diberikan sebesar Rp10,50 triliun per September 2020 dengan jumlah bantuan keseluruhan sebesar Rp31,80 triliun.

Persoalan utama yang sering muncul saat bantuan sosial akan diberikan oleh pemerintah adalah persoalan keakuratan data, pembaharuan data dan waktu penyaluran yang sering tidak tepat, baik dari segi sasaran ataupun waktu. Misalnya, Program Keluarga Harapan (PKH) yang sejak 2007 sudah ada sejak Susilo Bambang Yudoyono menjadi Presiden RI ke-6 yang merupakan bantuan sosial bersyarat kepada keluarga

penerimaan manfaat yang ditetapkan. Program ini juga dinobatkan sebagai program yang paling efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan antar-kelompok miskin ([republika.co.id](http://republika.co.id), 4 Januari 2020). Tetapi, sampai kepemimpinan Presiden Joko Widodo, persoalan pembaharuan data terus menjadi polemik, bukan saja polemik dalam pemerintahan pusat dan pemerintah daerah saja tetapi juga polemik di antara masyarakat. Masih banyak masyarakat yang tidak layak menerima namun mendapatkan bantuan sosial bahkan masyarakat yang dinilai lebih berhak mendapatkannya hanya bisa menonton dan mengeluh karena program tersebut tidak sampai pada mereka.

Padahal bantuan sosial yang diberikan tersebut mampu memberikan rasa tenang kepada masyarakat karena dapat menambah kebutuhan hidup keseharian mereka, meskipun itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup layak selama sebulan ([akurat.co](http://akurat.co), 3 Mei 2020). Bahkan sebagian masyarakat mengatakan bahwa bantuan sosial tersebut hanya cukup untuk dua sampai tiga minggu saja ([saifulmujani.com](http://saifulmujani.com), 12 Mei 2020), ([ekonomi.bisnis.com](http://ekonomi.bisnis.com), 8 April 2020).

### **Kesesuaian Data Penerima Bantuan Sosial**

Hal yang menarik dalam hasil survei nasional terkait bantuan sosial ini adalah dari 1.235 responden terdapat sebanyak 96% responden yang mengetahui bantuan sosial berupa pembagian bahan kebutuhan pokok (sembako), PKH dan BLT (Bantuan Langsung Tunai) untuk warga yang kurang mampu. Sebanyak 49% responden

menyatakan program bantuan tersebut kurang/tidak tepat sasaran, dan sebanyak 37% responden menyatakan program bantuan sudah tepat sasaran (saifulmujani.com, 12 Mei 2020). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa bantuan sosial belum menjangkau semua masyarakat yang rentan. Basis data yang digunakan dalam bantuan sosial hanya mencakup 40% masyarakat miskin (CSIS Commentaries, 15 April 2020) (bdt.tnp2k.go.id). Ini berarti data masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 belum termasuk pekerja informal, pekerja yang di-PHK, dan masyarakat UMKM.

Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan RI, hingga 31 Juli 2020, lebih dari 3,5 juta pekerja terdampak Covid-19, di mana 1.132.117 orang pekerja formal yang dirumahkan, 383.645 orang di-PHK, dan sebanyak 630.905 pekerja informal terdampak. Terkait hal ini, pemerintah perlu memberikan program khusus untuk membantu pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat yang terdampak tersebut dan keluarganya.

Pembaharuan data dan ketelitian/sinkronisasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan sebuah keniscayaan. Pemerintah Pusat diharapkan memberikan kepercayaan dan melakukan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah, serta melibatkan lembaga-lembaga pengawas dan mengontrol untuk meminimalisir kesalahan (cnnindonesia.com, 19 Mei 2020). Hal ini dikarenakan, pembaharuan data selalu menjadi persoalan dalam pemberian bantuan sosial. Seringkali bantuan sosial yang diberikan tidak

tepat sasaran, tidak tepat manfaat, tidak tepat jumlah dan seterusnya. Padahal masyarakat tertentu sangat mengharapkan adanya bantuan dari pemerintah. Banyak pembagian bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, atau tidak sampai kepada yang berhak, akibat data yang belum diperbaharui (cnnindonesia.com, 19 Mei 2020 dan republika.co.id, 4 Januari 2020). Pembaharuan basis data untuk penerima bantuan seharusnya dibuat lebih mudah dan fleksibel meskipun harus tetap terverifikasi dengan benar. Petugas pembaharuan data baik di lapangan atau di pusat diharapkan memiliki sikap yang responsif dan tegas dalam memilah data.

Integrasi data dari setiap kementerian/lembaga, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat penting. Harapan besar dari Presiden Joko Widodo, program bantuan sosial terutama saat pandemi dapat meringankan beban masyarakat yang betul-betul membutuhkan (Kompas, 10 September 2020). Penyatuan data yang baik bukan saja mengintegrasikan dan mensinkronkannya, tetapi pembaharuan data sesuai dengan keadaan terkini dan laporan petugas di lapangan/daerah juga harus direspons dengan cepat dan tepat oleh pemerintah pusat.

Berdasarkan beberapa penelitian, ada masyarakat yang mengembalikan bantuan sosial karena merasa mampu berdiri sendiri, dan memutuskan untuk keluar dari program bantuan, dengan alasan ada orang lain yang lebih berhak atas bantuan tersebut. Kesadaran seperti ini tentu saja dapat terbangun melalui komunikasi yang baik antara masyarakat penerima bantuan dan para pendamping program.

## Membangun Alternatif Bantuan Sosial

Menurunnya ketahanan ekonomi masyarakat saat pandemi mengharuskan negara hadir untuk mengangkat daya beli masyarakat dan membangkitkan solidaritas sosial. Negara harus mempersiapkan beberapa program sosial yang mampu bertahan jika suatu saat datang lagi pandemi Covid-19 atau bencana sejenis lainnya. Masyarakat, yang kebanyakan rentan terhadap suatu kondisi yang tidak pasti, diharapkan mampu bertahan melalui program bantuan yang berkesinambungan dan didampingi. Diharapkan, program-program yang dipersiapkan bukan hanya mampu menopang kehidupan masyarakat, tetapi juga mampu membuat masyarakat bertahan dalam situasi pandemi.

Program bantuan sosial yang memiliki perencanaan yang baik dan pendampingan yang berkelanjutan dapat menjadi alternatif bagi negara untuk mendorong masyarakat dalam perbaikan kehidupan ekonominya. Adanya program sosial yang mampu memberikan kepastian untuk pemenuhan kehidupan masyarakat sebelum musibah datang, akan lebih meringankan keuangan negara. Oleh karena itu bantuan sosial tidak dapat dielakkan selama terjadi bencana.

## Penutup

Persoalan utama pemberian program bantuan sosial, terutama di saat terjadi bencana alam dan pandemi, salah satunya adalah masalah data. Diharapkan data masyarakat yang layak dibantu dan memiliki potensi untuk dibantu harus selalu diperbaharui, sehingga terjadinya kesalahan penerima bantuan sosial dapat diminimalisir.

Masyarakat semestinya mendapatkan kemudahan untuk melaporkan situasi diri dan keluarganya jika mereka terdampak dan memerlukan bantuan sosial. Oleh karenanya, pemerintah harus mempertimbangkan mekanisme pelaporan tersebut. Komisi VIII DPR RI diharapkan mendesak kementerian/lembaga terkait untuk melakukan koordinasi dan memperbaharui data masyarakat miskin (yang memang harus mendapat bantuan) dan masyarakat hampir miskin (mereka yang mudah masuk ke jurang kemiskinan jika ada bencana tertentu).

## Referensi

- “Efektivitas Bantuan Sosial Covid-19”, 3 Mei 2020, <https://akurat.co/news/id-1104172-read-efektivitas-bantuan-sosial-covid19>, diakses 15 September 2020.
- “Indef: Bantuan Sembako Rp. 200.000 per Bulan Tak Cukup”, 8 April 2020, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200408/9/1224671/indef-bantuan-sembako-rp200.000-per-bulan-tak-cukup>, diakses 17 September 2020.
- “Jokowi Buka Masalah Penghambat Penyaluran Bansos Corona”, 19 Mei 2020, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519101930-532-504784/jokowi-buka-masalah-penghambat-penyaluran-bansos-corona>, diakses pada 20 september 2020.
- Lestary, Indira, Dewa, dan Yose, “Bantuan Sosial Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19: Sudahkah Menjaring Sesuai Sasaran?”, CSIS Commentaries ECON-002-ID, diakses 15 April 2020.

"Melihat Efektivitas 9 Bantuan dan Subsidi Pemerintah Selama 6 Bulan Pandemi", 3 September 2020, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/03/12090061/melihat-efektivitas-9-bantuan-dan-subsidi-pemerintah-selama-6-bulan-pandemi?>, diakses 15 September 2020.

"Pandemi Jadi Momentum Integrasi Data", *Kompas*, 10 September 2020, hal. 11.

Program Keluarga Harapan, Efektifkah Mengurangi Kemiskinan? 4 Januari 2020, <https://republika.co.id/berita/pksjco282/program-keluarga-harapan-efektifkah-mengurangi-kemiskinan>, diakses 20 September 2020.

"PSBB Sudah Tepat, Atasi Dampak Sosial-Ekonomi, *Kompas*, 11 September 2020, hal. 10.

"Ragam Bantuan Pemulihan Ekonomi Kala Pandemi", 13 September 2020, <https://www.antarane.ws.com/infografik/1723178/ragam-bantuan-pemulihan-ekonomi-kala-pandemi>, diakses 15 September 2020.

"Wabah Covid-19: Efektivitas Bantuan Sosial", 12 Mei 2020, <https://saifulmujani.com/wp-content/uploads/2020/05/0512-Rilis-covid-12-mei-FINAL.pdf>, diakses 15 September 2020.



Mohammad Teja  
[teja@dpr.go.id](mailto:teja@dpr.go.id)

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: "Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia sebagai Instrumen Pengendali dalam Pembangunan Berkelanjutan" (2013), "Peran CSR Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial" (2015), "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai" (2015).

### Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI  
<http://puslit.dpr.go.id>  
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.